

**DINAMIKA KOMUNIKASI KESEHATAN DALAM UPAYA
PENANGANAN COVID-19 DAN OPTIMALISASI VAKSINASI COVID-19
DI INDONESIA**

Afifah Rahmayani^{1*}, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni², Ign. Agung Satyawan²

¹Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

²Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*) Korespondensi penulis: Afifah Rahmayani
Email: afifahrahmayani@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Komunikasi merupakan hal penting sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Namun, krisis komunikasi selama pandemi dapat terjadi karena pemberian informasi yang kurang tepat dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dinamika komunikasi kesehatan serta optimalisasi vaksinasi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yang berasal dari hasil kajian pustaka/*literature review* dari berbagai sumber jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian pustaka dianalisis dengan menggunakan Teori Komunikasi Krisis Situasional serta strategi komunikasi kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia lambat dalam menyampaikan komunikasi publik, yang menyebabkan masyarakat abai dan tidak disiplin terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi krisis yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, agar upaya penanganan pandemi COVID-19 dapat maksimal, maka pemerintah melakukan strategi komunikasi kesehatan untuk mengukung program vaksinasi yang diyakini dapat mencegah penularan dan penyebaran COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, dinamika komunikasi kesehatan, komunikasi krisis, vaksinasi COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has hit the whole world, including Indonesia. Communication is important as an effort to deal with the COVID-19 pandemic. However, a communication crisis during a pandemic can occur due to the provision of inaccurate and fast information. This study aims to examine how the dynamics of health communication and the optimization of COVID-19 vaccination are. The research method used in this article is descriptive qualitative with data sources derived from the results of literature reviews from various sources of relevant national journals. The results of the literature review were analyzed using

Situational Crisis Communication Theory and health communication strategies. The results of the study show that the Government of Indonesia is slow in delivering public communications, which causes the public to be ignorant and undisciplined towards policies issued by the government. Therefore, effective crisis communication is needed to overcome this. So that efforts to handle the COVID-19 pandemic can be maximized, the government has implemented a health communication strategy to carry out a vaccination program that is believed to be able to prevent the transmission and spread of COVID-19.

Keywords: *COVID-19, dynamics of health communication, crisis communication, COVID-19 Vaccination*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Komunikasi sebagai pembentuk kehidupan bersama manusia dalam komunitas dan masyarakat (Liliweri, 2017). Komunikasi menjadi hal yang penting dan dibutuhkan saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 melanda dunia sejak akhir tahun 2019. Infeksi penyakit ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019, sejak saat itu penyakit ini telah menyebar luas ke seluruh dunia dan pada Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan penyakit ini sebagai pandemi (Ayuningtyas et al., 2020). Pandemi COVID-19 saat ini di seluruh dunia memiliki dampak yang sangat besar terhadap hampir di setiap aspek kehidupan manusia dan menjadi masalah publik di setiap negara baik dari segi sosial, ekonomi, maupun dalam ranah politik.

Banyak negara yang mengalami kebingungan dalam mengambil sebuah kebijakan di saat pandemi COVID-19. Setiap negara mencoba mengambil kebijakan paling tepat untuk menghambat percepatan penyebaran virus Corona. China sebagai negara pertama yang merupakan tempat terkonfirmasi virus SARS-Cov-2 khususnya di kota Wuhan melakukan *lockdown*/isolasi terhadap 11 juta populasi dengan pembatasan masuk dan keluar dari wilayah tersebut (Singhal, 2020). Negara-negara lain juga melakukan *lockdown*, atau kombinasi dari *social distancing*/pembatasan sosial, *quarantaine*/karantina di rumah, dan isolasi kasus individu yang terinfeksi maupun terpapar COVID-19 (Hasnain et al., 2020). Ada beberapa negara yang mampu mengatasi pengurangan penyebaran COVID-19. Pertama, yaitu Korea Selatan yang negaranya berhasil memitigasi awal pandemi COVID-19 tanpa melakukan *lockdown* di wilayah manapun. Selain itu Korea

Selatan juga melakukan langkah-langkah utamanya menggunakan pelacakan kasus dengan metode *drive-thru-clinics* berkapasitas 100.000 tes perhari pada Maret 2020, dan total akumulasi tes yang dilakukan pada April 2020 sebanyak 518.743. Serta melacak dan menemukan individu yang terpapar, mengkoordinasikan penugasan kasus dengan fasilitas perawatan kesehatan, dan pemeriksaan klinik secara selektif untuk pengunjung yang memasuki rumah sakit dengan wajib menggunakan masker (Kang et al., 2020).

Kemudian ada Vietnam yang merupakan negara yang memiliki sedikit kasus infeksi serta kematian COVID-19 di Asia Tenggara. Langkah-langkah yang dilakukan Vietnam yaitu, (1) Komitmen politik yang kuat dan tindakan cepat dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, (2) Melakukan praktik komunikasi resiko yang mengadopsi pendekatan kepada seluruh masyarakat dan multisektoral dengan komunikasi yang tepat waktu, akurat, dan transparan melalui berbagai saluran media yang paling umum hingga resmi serta terus mencermati semua berita palsu dan misinformasi mengenai COVID-19, (3) Surveilans intensif, manajemen kasus, pelacakan kontak, dan karantina kesehatan berskala besar untuk semua kasus yang baru dikonfirmasi COVID-19, dan (4) Serangkaian penangguhan penerbangan, penutupan sekolah dan penutupan semua tempat umum (Duong et al., 2020).

Upaya penanganan COVID-19 yang telah dilakukan beberapa negara diatas pada dasarnya hampir semuanya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada awalnya pemerintah Indonesia tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia untuk menghindari kepanikan masyarakat dan menghindari isu-isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kebijakan yang tidak responsif serta keliru yang dilakukan pemerintah tentu akan membahayakan jutaan rakyat Indonesia. Ketika negara-negara lain mengambil kebijakan untuk melakukan *lockdown* terhadap negaranya, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lain untuk berupaya menarik wisatawan dan bisnis. Selain itu, para elite politik Indonesia banyak yang memberikan narasi bernuansa meremehkan betapa berbahayanya virus Corona dengan menganggap bahwa virus tersebut dapat dihalau dengan doa. Respon

pemerintah sedikit berubah ketika ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 (Agustino, 2020).

Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 adalah penetapan bahwa COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya pada 4 Februari 2020. Kebijakan umum lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah 3M yaitu Mencuci tangan, Menggunakan masker, dan Menghindari keramaian (termasuk didalamnya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah) atau yang disebut dengan *social distancing* demi mencegah penularan COVID-19.

Seiring berjalannya waktu, *virus corona* mengalami mutasi genetik yang memunculkan berbagai macam varian virus dari Alpha hingga Omicron. Sehingga pemerintah diberbagai negara termasuk Indonesia mulai mencari solusi untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengembangkan sejumlah program untuk menangani epidemi, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu upaya untuk menanggulangi wabah yang terjadi saat ini adalah dengan program imunisasi nasional. Presiden menandatangani dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Program Imunisasi untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 (*Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 Di Indonesia, 2020*).

Vaksinasi bertujuan untuk menciptakan kekebalan pada masyarakat (*herd immunity*). Vaksinasi juga diharapkan dapat mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan, dan kematian akibat *virus corona*. Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, vaksin diperuntukkan untuk tenaga kesehatan; tahap kedua, sasaran vaksinasi adalah petugas pelayanan publik; tahap ketiga, sasaran vaksinasi dilakukan untuk masyarakat yang rentan terhadap kondisi geospasial, sosial, dan ekonomi; dan pada tahap keempat, vaksin diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin (R. K. Dewi, 2021).

Berdasarkan paparan diatas, maka dibutuhkan penerapan komunikasi yang efektif dalam menangani krisis kesehatan yang sedang terjadi. Kurangnya penerepan komunikasi krisis yang efektif dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan publik dan dapat memperlambat serta menghambat pemerintah dalam proses penanganan krisis yang sedang terjadi. Komunikasi kesehatan adalah elemen penting untuk pencegahan dan pengobatan; yang didalamnya terjadi pertukaran pesan simbolik yang berkaitan dengan kesehatan pribadi, organisasi, dan masyarakat. Kesehatan pribadi berhubungan dengan komunikasi dengan keluarga, teman, dan penyedia klinis seperti dokter dan perawat. Aspek organisasi mencakup hubungan yang dimiliki penyedia perawatan satu sama lain (Littlejohn, 2017). Oleh karena itu, sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji dinamika komunikasi kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19 dan optimalisasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka atau *literature review* dari beberapa artikel terkait. Kajian pustaka merupakan desain yang sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan dokumen yang ada. Tujuan akhir dari *literature review* ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya.

Literature yang digunakan berupa artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-jurnal nasional dalam *database Google Scholar*. Penggunaan kata kunci dalam mencari literatur yaitu: “komunikasi”, “dinamika komunikasi”, “komunikasi kesehatan”, “komunikasi krisis”, “komunikasi publik”, “kebijakan pemerintah”, “pandemi COVID-19”, dan “vaksinasi COVID-19”. Literatur yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan studi ini dan dipublikasikan. Penggunaan kriteria inklusi dan eksklusi terhadap seluruh literatur merupakan metode penyeleksian.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap enam artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2021-2022 mengenai dinamika komunikasi

pada masa pandemi COVID-19 serta terkait vaksinasi COVID-19 yang diterbitkan di beberapa jurnal nasional, seperti *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu komunikasi*; *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*; *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*; *Health Care: Jurnal Kesehatan*; *Jurnal Riset Komunikasi*; *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*. Kemudian, pada jurnal-jurnal tersebut dilakukan analisis secara deskriptif untuk pengolahan data agar mendapatkan pemahaman yang runtut dan sistematis.

Kajian teoritis menggunakan teori *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) atau komunikasi krisis situasional oleh Timothy Coombs (Littlejohn, 2017) dan strategi komunikasi kesehatan. Menggunakan SCCT ini maka peneliti dapat menjabarkan bagaimana krisis mempengaruhi atribusi yang dibuat oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam SCCT ada tiga kelompok pembagian dalam strategi respon primer ini, antara lain menyangkal yang merupakan upaya agar krisis yang terjadi tersebut tidak ada kaitannya dengan sebuah organisasi, pengurangan yakni melakukan upaya menurunkan persepsi *stakeholders* bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab yang rendah malah sebaliknya organisasi sangat bertanggung jawab, dan terakhir membangun kembali yaitu upaya dalam menciptakan sebuah citra positif melalui informasi positif tentang organisasi tersebut. (Hidayati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya penanganan COVID-19, cara berkomunikasi dan respon yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Namun, ketika pandemi COVID-19 mulai dirisaukan banyak negara di dunia yakni dari awal Januari sampai bulan Februari 2020, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan respons dan sikap antisipatif. Pemerintah Indonesia juga memiliki kelemahan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 sehingga menimbulkan kebijakan silang yang memicu kerancuan di masyarakat (Agustino, 2020). Selain itu, komunikasi publik yang tidak terencana dengan baik akan mengakibatkan kepanikan dan ketidakpercayaan masyarakatnya. Dalam mengantisipasi Pandemi COVID-19, seharusnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan secara jelas dan transparan ke masyarakat.

Dibutuhkannya komunikasi risiko yang efektif, secara umum, berarti bahwa semua pesan risiko terkait dapat disajikan dan dibagikan kepada masyarakat dalam proses komunikasi risiko secara terbuka dan tepat waktu, yang bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan pengetahuan antara pencetus informasi dan penerima informasi, serta menyesuaikan perilaku publik untuk mengatasi risiko secara proaktif (Zhang et al., 2020). Ketika pemerintah lambat dalam menyampaikan komunikasi publik, masyarakat akan abai dan tidak mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jika dilihat kembali dengan menggunakan teori SCCT dalam strategi respon primer yaitu strategi penyangkalan, pemerintah Indonesia tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia untuk menghindari kepanikan masyarakat dan menghindari isu-isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini sudah terlihat bahwa pemerintah melakukan penyangkalan terhadap adanya COVID-19 yang sudah mulai menyebar di negaranya.

Kemudian, masih dalam strategi respon primer, yaitu strategi pengurangan. Pemerintah Indonesia kemudian memperkuat pandangan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap adanya krisis. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu mengeluarkan kebijakan pertama sesuai dengan surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 adalah penetapan bahwa COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya pada 4 Februari 2020. Kedua, deklarasi nasional situasi darurat spesifik COVID-19 oleh kepala BNPB pada 28 Februari 2020. Pada 13 Maret 2020 dibentuklah regulasi penting pertama yang diberi nama Satgas Respon Cepat terhadap COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) oleh Presiden Indonesia (Djalante et al., 2020). Satgas COVID-19 sendiri bertugas untuk menginformasikan kepada tenaga medis dan masyarakat umum tentang cara-cara untuk mengurangi dampak dan kematian dari COVID-19. Informasi yang diberikan termasuk protokol kesehatan, dan protokol-protokol lain yang menyangkut penanganan COVID-19. Beberapa langkah tersebut adalah sosialisasi tentang gerakan 3M (Mencuci tangan, Menggunakan masker, dan Menghindari keramaian),

termasuk didalamnya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah atau yang disebut *physical distancing/social distancing*, sampai larangan untuk mudik lebaran.

Selanjutnya dalam strategi respon primer, yaitu strategi pembangunan kembali pemerintah Indonesia dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik pemerintah terus mencoba melakukan komunikasi publik yang ditangani secara komprehensif, sistematis, serta searah kepada publik. Walaupun tidak menutup suatu kemungkinan dalam proses penyampaian pesan sering terjadi kesalahpahaman atau gangguan pada pesan yang lebih disering disebut dengan *hoax* (S. A. E. Dewi, 2021).

Setelah strategi penyangkalan, strategi pengurangan dan strategi pembangunan kembali jika dilihat dari SCCT oleh pemerintah Indonesia, maka dibutuhkan pula strategi komunikasi kesehatan. Strategi komunikasi bukan hanya untuk mengatasi *hoax*, tetapi untuk menghindari kepanikan massal yang dapat berakibat lebih buruk dari pandemi itu (*Komunikasi Kesehatan Berperan Penting Di Masa Pandemi COVID-19*, n.d.). Strategi komunikasi kesehatan juga merupakan perpaduan antara perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi komunikasi yang dilaksanakan adalah untuk mengelola dan mengatasi masalah kesehatan, yaitu yang berkaitan dengan krisis penyebaran COVID-19 (Paramasari & Nugroho, 2021). Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Saraswati & Sunarta, 2021). Indonesia telah memasuki tahapan penting dari penanganan COVID-19, yaitu tahap vaksinasi. Vaksinasi diyakini dapat mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, yang nantinya menjadi penentu bagi pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya. Ketidakpercayaan sebagian warga negara terhadap vaksin COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di seluruh belahan dunia. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bersama (S. A. E. Dewi, 2021).

Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta

membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19 (Saraswati & Sunarta, 2021). Vaksinasi dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Hal ini lantaran imunitas atau antibodi tubuh telah terbentuk untuk melawan COVID-19. Keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan dari tujuan kebijakan vaksinasi COVID-19. Namun kekhawatiran masyarakat akan dampak vaksinasi COVID-19 merupakan gambaran krisis komunikasi di era pandemi saat ini. Sehingga dasar dari komunikasi krisis adalah untuk merespon sesegera mungkin setelah krisis terjadi, melalui transparansi informasi dan kejujuran dengan *stakeholders*, baik yang terkena efek langsung maupun tidak langsung (Hidayati, 2022). Komunikasi yang efektif juga harus bertujuan untuk menjelaskan dengan hati-hati tingkat keefektifan vaksin, waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan (dengan berbagai dosis, jika diperlukan) dan pentingnya cakupan seluruh populasi untuk mencapai kekebalan komunitas. Menanamkan kepercayaan publik dalam tinjauan badan pengawas tentang keamanan dan keefektifan vaksin akan menjadi penting (Alfreda, 2021). Dengan komunikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, diharapkan masyarakat nantinya mau mengikuti program vaksinasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penderita yang terpapar/meninggal karena COVID-19 (Helmi et al., 2021). Kebijakan vaksinasi COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pemerintah dalam menciptakan keteraturan serta ketertiban masyarakat dapat terwujud.

Pada akhirnya, sesuai dengan konsep komunikasi serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maka sebuah komunikasi dan kebijakan diciptakan untuk menyelesaikan masalah dengan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan permasalahan baru seperti yang sedang terjadi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Setiap komunikasi serta kebijakan yang dilakukan pemerintah berisi aturan hingga larangan yang diharapkan mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban pada masyarakat dalam upaya penanganan serta optimalisasi program vaksinasi COVID-19.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang melanda seluruh dunia secara tidak terduga. Oleh karena itu, upaya penanganan yang dilakukan untuk pandemi ini adalah dengan melakukan komunikasi krisis dan komunikasi publik sebagai sarana pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah terlambat dalam hal pemberian informasi untuk masyarakat, maka krisis komunikasi dapat terjadi dan mempengaruhi pemahaman publik mengenai COVID-19 yang mengakibatkan rendahnya tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat untuk mentaati himbauan serta kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Teori krisis komunikasi situasional serta strategi komunikasi kesehatan yang baik dapat membantu pemerintah untuk mengkaji dan menguraikan bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Dengan komunikasi yang baik serta pemberian informasi secara terus-menerus, pemerintah juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 agar ikut berpartisipasi menyukseskan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dirasa mampu menjadi faktor penentu yang memungkinkan masyarakat untuk dapat kembali ke rutinitas normalnya setelah pandemi berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas, saran dan masukan dari peneliti yaitu dalam kaitannya dengan komunikasi krisis dan komunikasi publik upaya penangan dan optimalisasi vaksinasi COVID-19 pemerintah harus melakukannya secara terintegrasi dan berkesinambungan sebagai tindakan pencegahan selanjutnya dengan memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi jika terpapar COVID-19. Strategi komunikasi kesehatan pun harus tepat dan efektif dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi agar komunikasi yang dijalankan dapat efektif dan tepat sasaran, seperti: memilih dan memilah komunikator sebagai sumber pesan yang tepat; pemilihan dan penggunaan pesan yang efektif; serta memilih media komunikasi yang efektif. Kemudian dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah perlu secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang diharapkan akan terus menumbuhkan pandangan positif masyarakat untuk

melakukan vaksinasi. Selain itu, pemerintah harus selalu terbuka terhadap masyarakat atas segala informasi yang dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini didukung oleh tim yang menyumbangkan wawasan dan keahlian yang sangat membantu penelitian melalui saran dan komentar yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Alfreda, J. (2021). Tinjauan Komunikasi Publik Di Era Pandemi Covid-19 Terkait Optimalisasi Vaksinasi Covid-19. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 10(2), 229–238.
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/article/view/1505>
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., Parinduri, S. K., Susanti, F. A., Sutrisnawati, N. N. D., & Munawaroh, S. (2020). Local Initiatives In Preventing Coronavirus Based On Health Policy Perceptive. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 5(2), 66–71. <https://doi.org/10.7454/ihpa.v5i2.4057>
- Dewi, R. K. (2021). *4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 dan Jadwal Pelaksanaannya*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/09/200200965/4-tahapan-vaksinasi-covid-19-dan-jadwal-pelaksanaannya?page=all>
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162–167.
<https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091.

<https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>

- Duong, D. M., Le, V. T., & Ha, B. T. T. (2020). Controlling the COVID-19 Pandemic in Vietnam: Lessons From a Limited Resource Country. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 32(4), 161–162. <https://doi.org/10.1177/1010539520927290>
- Hasnain, M., Pasha, M. F., & Ghani, I. (2020). Combined measures to control the COVID-19 pandemic in Wuhan, Hubei, China: A narrative review. *Journal of Biosafety and Biosecurity*, 2(2), 51–57. <https://doi.org/10.1016/j.jobb.2020.10.001>
- Helmi, R. F., Nurhabibie, P., Yuliarti, & Hanoselina, Y. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Padang Dalam Meminimalisir Infodemic Vaksinasi Covid-19. *Al Munir Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 12, 166–180.
- Hidayati, Y. (2022). Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka pada Pemberitaan Efek Samping Vaksin COVID-19. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5, 16–31.
- Kang, J. H., Jang, Y. Y., Kim, J. H., Han, S. H., Lee, K. R., Kim, M., & Eom, J. S. (2020). South Korea's responses to stop the COVID-19 pandemic. *American Journal of Infection Control*, 48(9), 1080–1086. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.06.003>
- Komunikasi Kesehatan Berperan Penting di Masa Pandemi COVID-19*. (n.d.). <https://www.unpad.ac.id/2020/04/komunikasi-kesehatan-berperan-penting-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Liliweri, A. (2017). *KOMUNIKASI ANTARPERSONAL* (Cetakan ke). PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Littlejohn, S. W. (2017). *THEORIES OF HUMAN COMMUNICATION* (ELEVENTH E). WAVELAND PRESS, INC.
- Paramasari, S. N., & Nugroho, A. (2021). Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Upaya Membangun Partisipasi Publik pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 123–132.
- Saraswati, K. C., & Sunarta, I. N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

VAKSINASI COVID 19 DALAM MENGURANGI TINGKAT PENYEBARAN VIRUS CORONA DI KOTA DENPASAR. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 21–27.
<http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica>

Singhal, T. (2020). Review on COVID19 disease so far. *The Indian Journal of Pediatrics*, 87(April), 281–286.

Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia (Issue November). (2020).

Zhang, L., Li, H., & Chen, K. (2020). *Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China*. 19.